



# Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi Covid-19

Jihan Nadya Yahya\* | Helga Yohana Simatupang

## INSTITUSI/ AFILIASI

Program Studi Hubungan Internasional,  
Universitas Potensi Utama, Medan,  
Indonesia.

## KORESPONDENSI

\*Jihan, Universitas Potensi Utama, Jl. Kl.  
Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Kota Medan,  
Sumatera Utara, 20241, Indonesia.  
Email: [jihanadyahya01@gmail.com](mailto:jihanadyahya01@gmail.com)

## ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has disrupted all aspects of our life. It forced us to adopt to a new normal situation and take innovative measures in tackling the pandemic in order to survive. Health experts developed vaccines to reduce human death and helped people recover from the virus infection. The development of the vaccines has made a great contribution to global health. Indonesia itself used seven vaccine variants, which have been approved by the government for nationwide use. Among them are sinovac and sinopharm vaccines, which were made by China. China has helped Indonesia in many ways, in the provision of vaccines, and the bilateral relations between Indonesia and China continued to increase. This article shows that the provision of Covid-19 vaccines contributed to the strong relations between Indonesia and China, and this was channelled through what was called vaccine diplomacy. In this article, the author will be using the global politics theory to analyze the issue. Through this article, scholars can identify the challenges and benefits of the cooperation.

## KEYWORDS

China; Cooperation; Diplomacy; Indonesia; Vaccine

## PENDAHULUAN

Kemunculan awal Virus Covid-19 terjadi pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok ([Yang dkk., 2020](#)). Beberapa bulan setelahnya yakni pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) mengumumkan bahwa dunia mengalami pandemi akibat dari penyebaran virus Covid-19 dalam skala global ([World Health Organization, 2020](#)). Kasus pasien terinfeksi Virus Covid-19 di Indonesia sendiri ditemukan pertama kali pada 2 Maret 2020. Saat itu, tentunya pemerintah Indonesia belum menyiapkan strategi dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 sehingga berdampak kepada tingginya angka ketidakwaspadaan masyarakat mengenai virus ini. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia setiap harinya pada tahun pertama pandemi. Indonesia dihantam badai besar tanpa adanya persiapan pertolongan diri untuk mengurangi dampak yang diterima.

Di tengah kewalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik terhadap alat kesehatan sebagai upaya awal untuk mengendalikan situasi ([Hidayat dkk., 2022](#)). Negara yang menjadi pemasok alat kesehatan untuk Indonesia pada awal pandemi adalah Tiongkok. Hal ini bukan tanpa alasan, Tiongkok telah lebih dahulu merasakan wabah virus Covid-19 di dalam negeri yakni semenjak tahun 2019 akhir sehingga keadaan di Tiongkok sudah lebih terkendali ([Lee, 2021](#)). Berbanding terbalik dengan negara-negara pemasok alat kesehatan lainnya yang pada 2020 awal sedang kewalahan dalam menanggulangi virus Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi permintaan alat kesehatan dari negara lain sebab adanya permintaan yang tinggi pada pasar lokal mereka. Terhitung pada November 2020 tercatat ada sebesar Rp 5,63 triliun nilai impor alat kesehatan yang berasal dari Tiongkok masuk ke Indonesia ([Hidayat, 2020](#)). Adanya kemudahan akses distribusi serta ketersediaan pasokan yang dapat mencukupi permintaan pasar Indonesia menjadikan Tiongkok sebagai mitra penting selama masa pandemi.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya riset penelitian yang dilakukan oleh tenaga medis ahli, kemitraan Indonesia dan Tiongkok selama pandemi tidak hanya terbatas pada alat-alat kesehatan saja namun kemudian bertambah juga pada vaksin. Tiongkok menjadi negara pertama yang memproduksi *antithesis* dari virus Covid-19 yakni vaksin yang terbagi dalam dua varian yaitu Sinopharm dan Sinovac. Pembuatan vaksin yang dilakukan oleh Tiongkok ini telah dijamin oleh WHO sehingga vaksin tersebut bisa digunakan dalam skala global. Perbedaan yang terletak pada kedua vaksin tersebut adalah kepemilikan pabrik, dimana Sinovac dikelola oleh perusahaan swasta sedangkan Sinopharm dikelola oleh pemerintah Tiongkok. Kedua vaksin memiliki tipe yang sama yakni tipe vaksin yang menonaktifkan virus dan kemudian disuntikkan kepada pasien sehingga tubuh akan melawan virus mati yang masuk ke dalam tubuh sebagai bentuk perlindungan terhadap infeksi. Keunggulan dari kedua vaksin tersebut terletak pada penyimpanannya yang tidak sulit yaitu cukup menggunakan suhu pendinginan normal ([Pearson, 2021](#)).

Hal tersebut kemudian membuat Sinopharm dan Sinovac menjadi mudah untuk didistribusikan ke negara lain terutama negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Tiongkok misalnya seperti Indonesia. Kemudahan distribusi tersebut membuat Sinovac dan Sinopharm menjadi vaksin yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia untuk digunakan oleh warganya. Selain itu, kemitraan Indonesia dengan Tiongkok yang sudah berjalan dengan baik semakin mempermudah jalinan kerja sama yang terjadi dalam bidang vaksin ini. Selanjutnya muncul istilah baru yaitu diplomasi vaksin yang mana dapat menjelaskan bagaimana suatu kecenderungan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam kebijakan luar negerinya ternyata dapat dipengaruhi oleh vaksin. Vaksin dalam hal ini dijadikan alat/*tools* dalam diplomasi. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan kepada negara-negara produsen vaksin guna memenuhi kebutuhan domestik ([Kominfo, 2021](#)).

Diplomasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pasokan vaksin dari negara produsen dan juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas jalinan kemitraan yang dimiliki oleh Indonesia secara internasional ([Theconversation.com, 2021](#)). Disini negara yang diwakilkan oleh individu menjadi aktor yang berperan. Negara hadir dalam menciptakan sistem kerja sama yang terjadi sementara individu (Menteri dan Kepala Negara) menjadi pihak yang menginisiasi kerja sama. Pembahasan mengenai diplomasi vaksin merupakan bentuk dari perkembangan fenomena di dalam hubungan internasional yang mana kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara tidak terbatas dan menyebar secara menyeluruh ke berbagai aspek. Perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkup global kemudian juga mempengaruhi terjadinya perubahan peta politik internasional. Praktik diplomasi kemudian menjadi semakin beragam mengikuti perkembangan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan konsep *multi-track diplomacy* yang mana pemeliharaan perdamaian internasional adalah sistem dinamis yang terdiri atas tindakan, orang, organisasi, dan komunitas yang saling berhubungan dan berjuang untuk perdamaian dunia ([McDonald, 2002](#)). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai diplomasi vaksin dengan meneliti studi kasus kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok.

Artikel ini akan menjelaskan mengenai contoh praktik diplomasi vaksin dalam studi kasus Kerja sama Indonesia dengan Tiongkok selama masa pandemi dari tahun 2019 hingga 2022. Dari riset terhadap isu tersebut, penulis akan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam kerja sama yang terjalin sehingga pembaca mampu memahami pengertian serta penerapan dari diplomasi vaksin.

## TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORITIS

### Tinjauan Literatur

Studi pertama yang relevan dengan artikel ini adalah *Covid-19 Vaccine Donations-Vaccine Empathy or Vaccine Diplomacy? A Narrative Literature Review* oleh Zhaohui Su, dkk. Pada tulisan tersebut dilakukan penelitian terhadap beberapa artikel yang berkaitan dengan

Vaksin Covid-19 dalam rentang waktu 5 bulan yaitu mulai Januari 2021 hingga Mei 2021. Karya ilmiah tersebut menjelaskan adanya peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Donasi Vaksin dan Diplomasi Vaksin. Keduanya merupakan hal yang saling berhubungan, donasi vaksin dilakukan sebuah negara sebagai bentuk dari penerapan diplomasi vaksin ([Sudkk., 2021](#)).

Donasi vaksin terjadi dikarenakan adanya ketidaksetaraan jumlah vaksin Covid-19 yang tersebar secara global. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya diplomasi vaksin yang mana sebuah negara memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun relasi dengan negara lain serta mewujudkan kepentingan nasionalnya ([Sudkk., 2021](#)). Lebih lanjut, perbedaan antara studi terdahulu dan artikel ini adalah cakupan dalam pembahasan. Studi Zhaohui Sui, dkk menganalisis mengenai dasar terjadinya diplomasi vaksin sementara pada artikel ini akan dibahas mengenai contoh kasus dari penerapan diplomasi vaksin yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok.

Studi selanjutnya yang dianggap relevan adalah *China's Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A Mixed Record* oleh Khairulanwar Zaini. Di dalam tulisan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Tiongkok menjadi pionir dalam pendistribusian vaksin di masa-masa awal pandemi ([Zaini, 2021](#)). Saat negara-negara Barat yang notabene nya berperan sebagai pemegang pasar dalam bidang kesehatan masih sibuk untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya, di sisi lain Tiongkok sudah mulai gencar untuk mendistribusikan vaksin buatannya kepada negara lain. Pelaksanaan diplomasi vaksin Tiongkok dicap sebagai bentuk "pencitraan" oleh banyak negara dikarenakan Virus Covid-19 diduga berasal dari negeri Tirai Bambu walaupun politisi serta pejabat Tiongkok berulang kali menekankan bahwa diplomasi vaksin dilakukan untuk kepentingan masyarakat global agar pulih dari pandemi ([Zaini, 2021](#)).

Ketika negara-negara Barat telah memenuhi kebutuhan domestik mereka, tercipta persaingan yang terjadi antara kedua kubu dalam bidang diplomasi vaksin. Kedudukan Tiongkok mulai melemah ketika negara-negara Barat mengatakan bahwa vaksin yang berasal dari Tiongkok belum dapat dibuktikan keefektifannya. Kondisi tersebut sebenarnya bisa ditanggulangi jika pemerintah Tiongkok membangun kerja sama dengan negara lain terkait produksi vaksin. Kompetisi harus dihindarkan agar kepentingan nasional Tiongkok dapat tercapai. Selanjutnya, Tiongkok harus lebih transparan terkait uji vaksin yang mereka buat sehingga masyarakat internasional tidak meragukan keefektifan vaksin tersebut ([Zaini, 2021](#)). Perbedaan antara studi Zaini dengan artikel ini terletak pada fokus objek penelitian. Pada artikel ini fokus dari pembahasan adalah Indonesia dan Tiongkok sementara artikel Zaini membahas Tiongkok dan Asia Tenggara.

### **Kerangka Teoritis**

Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori Politik Global. Teori ini menjelaskan adanya kompleksitas dalam hubungan yang terjalin antar aktor dalam skala internasional. Istilah Politik Global digunakan untuk menggantikan istilah lama Politik Internasional

karena cakupannya yang tidak hanya membahas hubungan antar negara tetapi juga memperhitungkan keterlibatan aktor-aktor non-negara yang berkiprah pada tataran global serta implikasinya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan.

Selain itu, isu-isu global seperti proliferasi nuklir, terorisme, *energy security*, perubahan iklim, meningkatnya harga pangan, *good governance*, kemiskinan, penyebaran penyakit secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepentingan semua aktor internasional baik negara maupun non-negara ([Jemadu, 2008](#)). Dalam pandangan ini, global berarti komprehensif yang mana mengacu pada semua elemen dalam suatu sistem, bukan hanya pada sistem secara keseluruhan. Politik global dengan demikian terjadi tidak hanya pada tingkat global, tetapi di seluruh, semua tingkatan – di seluruh dunia, regional, nasional, sub-nasional dan seterusnya ([Heywood, 2011](#)).

Dengan berkembangnya organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan munculnya tantangan global, aspek internasional dari politik menjadi semakin penting dalam beberapa dekade terakhir. Lingkungan dan ekonomi adalah dua contoh isu global karena keduanya berdampak pada semua orang di bumi dan semua wilayahnya. Kehidupan modern ditentukan oleh kecenderungan interkoneksi global ini, yang kemudian mengharuskan untuk mempertimbangkan kembali strategi pembelajaran konvensional dan merangkul pendekatan "tanpa batas" terhadap politik ([Heywood, 2011](#)).

Kepentingan dan kekuasaan merupakan kata kunci dari teori ini. Penulis memilih teori ini karena dalam studi kasus kerja sama Indonesia dengan Tiongkok terdapat kepentingan masing-masing yang dimiliki oleh negara tersebut. Kerja sama yang dilakukan tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga meraih kekuasaan terhadap satu negara. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa teori Politik Global dapat digunakan untuk menjadi acuan berpikir dalam karya ilmiah ini.

Karya tulis ini menggunakan konsep *Soft Power Diplomacy*, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang terjadi dengan menggunakan jalur damai tanpa kekerasan. *Soft Power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi preferensi orang lain, yang berakar pada rayuan dan daya tarik pribadi. Para pemimpin politik mengendalikan topik dan menetapkan parameter, memberi mereka kekuasaan dalam politik demokratis. Kualitas yang tidak berwujud seperti kepribadian yang diinginkan, budaya, institusi politik, cita-cita, dan kebijakan yang sah seringkali dikaitkan dengan pembentukan preferensi ([Nye, 2008](#)).

*Soft Power* melibatkan daya pikat dan daya tarik, mempengaruhi perilaku dengan sumber daya yang memikat. Hal ini lebih dari sekadar pengaruh. Daya tarik sumber daya dan kemampuannya untuk mempengaruhi hasil kebijakan yang diinginkan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran aset-aset yang menarik. *Soft power* bukan satu-satunya jenis *power* yang memiliki perbedaan antara kekuatan yang dievaluasi dalam hal sumber daya dan kekuatan yang dinilai dalam hal konsekuensi perilaku ([Nye, 2008](#)). Di masa sekarang, praktik diplomasi menggunakan *soft power* dinilai lebih minim resiko dan efektif untuk mencapai kepentingan yang ingin diraih. Penulis memilih konsep tersebut dikarenakan

diplomasi vaksin merupakan suatu bentuk penerapan dari *soft power diplomacy* yang dilakukan oleh kedua negara.

Konsep yang berikutnya dipakai dalam menganalisa studi kasus adalah kerja sama bilateral yakni kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak. Ada beberapa dampak historis, geopolitik, dan moneter yang penting dari kemitraan bilateral. Kerajaan-kerajaan Eropa di masa lalu menggunakan kedutaan besar resmi untuk melakukan hubungan diplomatik, yang mengakui kesetaraan semua negara berdaulat. Strategi ini, yang populer hingga Perang Dunia Pertama, melibatkan kedutaan besar, kerahasiaan, dan perkawinan antar keluarga bangsawan. Munculnya beragam bentuk hubungan bilateral antara Eropa dan seluruh dunia dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kolonial dan dekolonisasi ([Pannier, 2020](#)).

Promosi kepentingan nasional dan organisasi negosiasi internasional sangat terbantu dengan adanya hubungan bilateral. Dalam pembicaraan multilateral, hubungan bilateral sangat penting untuk membentuk aliansi dan memajukan kepentingan. Ketika dilihat sebagai keuntungan taktis dan dimotivasi oleh kepentingan individu daripada inklusivitas, hubungan bilateral seringkali lebih disukai ([Pannier, 2020](#)). Praktik kerja sama bilateral dalam studi kasus yang diangkat dalam artikel ini terjadi antara Indonesia dan Tiongkok. Jika dibandingkan dengan bentuk kerja sama lainnya, kerja sama bilateral dalam kasus ini dipilih lantaran pengambilan keputusan lebih cepat diraih sebab hanya ada dua pihak dalam jalinan kerja sama. Kerja sama Bilateral kemudian terbukti lebih efektif terutama pada masa pandemi karena akan terjalin dengan tepat guna, cocok untuk kondisi mendesak yang ditimbulkan oleh pandemi. Jalinan kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok yang sudah berlangsung dengan baik sejak 13 April 1950 menjadi alasan dalam keberlanjutan kerja sama yang terjadi antar kedua negara hingga saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode kerja untuk memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, dan menganalisis situasi serta keadaan topik permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil riset kepustakaan. Tulisan ini berfokus pada diplomasi vaksin dan studi kasus yang diamati adalah Kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari buku teks, jurnal, literatur, data dari lembaga penelitian, data dari lembaga terkait, dan data berita di internet.

Jurnal, artikel, berita dan informasi yang digunakan rentang waktu lima tahun terakhir kecuali untuk acuan teori dan konsep, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan perkembangan yang ada. Penulis mengutip pernyataan ahli yang mendukung dalam topik yang dibawakan oleh karya tulis ini melalui buku-buku terbitan mereka. Kesaksian ahli penting untuk menjelaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian pada karya tulis ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi yang relevan dengan subjek di internet. Proses analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul.

Analisis data dilakukan dengan mempelajari, memahami, membandingkan berbagai literatur, menafsirkan hasil analisis dan memecahkan masalah. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari masalah yang dipecahkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diplomasi vaksin

Pandemi telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, ditemukan adanya berbagai perkembangan dan perubahan yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi. Berbagai hal mengalami perubahan, salah satunya adalah dalam percaturan politik global. Pandemi Covid-19 mempengaruhi atmosfer relasi antar negara yang mana tiap negara saling bahu-membahu untuk bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi serta mencoba mencari celah untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing. Diplomasi vaksin adalah salah satu upaya yang dilakukan. Diplomasi vaksin merupakan hubungan antar negara yang terjalin didasari oleh kepentingan negara tersebut di bidang vaksin. Pada penerapan diplomasi yang dilakukan, vaksin dijadikan alat untuk mencapai kepentingan masing-masing negara.

Kepentingan negara yang dimaksud disini bisa memiliki beragam makna. Jika kita merujuk kepada studi kasus yang dibahas yaitu Kerja sama Indonesia dengan Tiongkok maka kepentingan yang dimiliki Indonesia dalam melakukan diplomasi vaksin adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik serta sebagai gerbang terbukanya kerja sama di bidang lainnya ([Anggraito, 2022](#)). Sementara di lain sisi, diplomasi vaksin merupakan siasat Tiongkok untuk memperbaiki citranya di kancah internasional setelah dianggap sebagai sumber virus Covid-19. Tiongkok juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan perekonomian dan kepentingan nasionalnya dalam isu internasional ([Agape, 2021](#)). Penjualan vaksin Sinovac meningkat dalam kurun waktu setengah tahun 2021 dengan total keuntungan sebanyak US\$ 11 miliar. Dibandingkan dengan US\$67,7 juta pada tahun 2020 dan kerugian 12,6 juta pada paruh pertama tahun tersebut, laba inokulasi vaksin Covid-19 Sinovac mencapai US\$5,1 miliar pada tahun 2019 ([Bestari, 2022](#)).

Salah satu kunci pengendalian wabah Covid-19 di Indonesia adalah diplomasi vaksin yang diawasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Retno dan para menteri Kabinet Kerja lainnya telah bekerja untuk mengamankan stok vaksin Covid-19 sejak awal pandemi. Namun pada prosesnya tentu dijumpai berbagai tantangan yaitu terkendalanya pasokan alat-alat kesehatan, misalnya salah satu pasokan alat kesehatan Indonesia berasal dari India. India yang sedang berada di puncak kasus tertinggi selama pandemi mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan dari Indonesia bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka.

Untuk menyiasati hal tersebut Indonesia menerapkan *dose sharing*. Setiap negara akan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan vaksin masing-masing yang mana jika ada negara yang kelebihan pasokan maka akan diberikan ke negara yang membutuhkan melalui COVAX serta negara-negara juga melakukan penggalangan dana untuk memenuhi

kebutuhan vaksin negara menengah kebawah. Hingga 12 Juli 2021, Indonesia telah menerima 132.727.140 dosis vaksin. Dari jumlah tersebut, 118 juta disediakan oleh Sinovac, 8 juta oleh AstraZeneca melalui COVAX, 2 juta oleh Sinopharm, hampir 1 juta oleh AstraZeneca dari Jepang, dan dari Amerika Serikat yakni Moderna sebesar 3 juta ([Kominfo, 2021](#)). Pendekatan diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah berhasil mengamankan stok vaksin.

### **Pertimbangan Politik Indonesia memilih Tiongkok sebagai Mitra dalam Diplomasi Vaksin**

Merujuk pada paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk dapat berkontribusi kepada kesejahteraan dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah menjelaskan bahwa kebijakan dan tindakan Indonesia menjawab keprihatinan global dan tujuan nasional melalui hubungan internasional dan hukum internasional bertujuan untuk mencapai tujuan nasional ([Yuniarto, 2022](#)). Politik luar negeri bebas aktif oleh karena itu adalah segala upaya yang dilakukan dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, ditetapkan prioritas kerja sama dengan dunia internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Lingkaran konsentris tersebut terfokus dalam ([Kemenlu, 2019](#)):

1. Prioritas pertama yakni ASEAN.
2. Prioritas kedua yakni ASEAN + 3 (Jepang, Tiongkok, Korea Selatan)
3. Prioritas ketiga yakni kerja sama dengan *like-minded developing countries* untuk memperkecil kesenjangan antara negara berkembang dan maju.
4. Prioritas keempat yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai mitra utama ekonomi.

Melalui lingkaran konsentris tersebut dapat terlihat bahwa Tiongkok berada pada prioritas kedua dalam kerja sama Indonesia sehingga segala bentuk kerja sama yang terjadi akan lebih difokuskan dibandingkan dengan prioritas dibawahnya. Hal ini menjadi alasan kuat dibalik terjadinya diplomasi vaksin di antara keduanya.

Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin kerja sama bilateral selama 72 tahun lamanya. Kemitraan yang telah berlangsung lama tersebut merupakan bukti bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan keduanya berjalan dengan sangat baik. Tiongkok rutin berinvestasi kepada Indonesia dengan angka yang meningkat tiap tahunnya. Terhitung pada Januari hingga September 2021, Tiongkok telah berinvestasi sebesar US\$ 2,3 miliar ([Jayani, 2021](#)). Pada 2020, investasi Tiongkok mencapai puncaknya dibandingkan 5 tahun sebelumnya, padahal 2020 merupakan awal pandemi Covid-19. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Tiongkok ke Indonesia Jan 2016 – Sep 2020

Tahun	PMA
2016	2,7
2017	3,4
2018	2,4
2019	4,7
2020	4,8

Sumber: [Jayani \(2021\)](#)

Besarnya nilai investasi yang dikeluarkan Tiongkok pada 2020 pada Indonesia menjadi alasan kuat terkait jalinan kerja sama yang terjadi selama pandemi. Faktor pendukung selanjutnya yang semakin memperkuat yakni adanya kedekatan geografis Indonesia dengan Tiongkok sehingga memudahkan proses distribusi vaksin yang dibutuhkan dengan cepat sebagai penanganan dari Covid-19.

### Peluang

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok dalam diplomasi vaksin diawali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi yang kala itu melakukan panggilan telepon bersama dengan Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi ([Sorongan, 2021](#)). Mereka tak hanya membahas mengenai bagaimana cara untuk menanggulangi pandemi namun juga merencanakan kerja sama selanjutnya yang akan dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang kesehatan. Setelahnya, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping melakukan pembicaraan via telepon untuk membahas lebih lanjut mengenai kerja sama yang akan dilakukan oleh kedua negara, dari sinilah praktik diplomasi vaksin yang dilakukan oleh kedua negara dimulai ([Hermawan, 2020](#)).

Sebelum mengirimkan pasokan vaksin ke Indonesia, terhitung pada 23 Maret 2020 Tiongkok telah mengirimkan persediaan medis seperti topi bedah, masker, alat pelindung, kacamata, sarung tangan, dan penutup ([Julita, 2020](#)). Kemudian Tiongkok juga memasok 40ton pasokan medis lainnya, seperti alat tes covid dan alat pelindung diri. Hingga Juni 2020,

Tiongkok terhitung sudah mengirimkan 50 ventilator portabel, 150.008 alat tes PCR, 80.000 masker medis, 1,4 juta masker bedah, dan 80.000 alat pelindung diri dengan total nilai 7,8 miliar Rupiah atau 557.142 dolar AS ([Rezgisari, 2021](#)). Sejak Maret 2020, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kesehatan Indonesia telah berusaha untuk mencari peluang kerja sama dengan perusahaan asing agar mendapatkan akses vaksin Covid-19. Sinovac Biotech Ltd, sebuah perusahaan pengembang vaksin asal Tiongkok, menjadi yang pertama kali bekerja sama dengan Indonesia. Dalam uji klinis dan produksi vaksin, perusahaan ini bermitra dengan PT Biofarma. Pesanan terbesar yang pernah dilakukan oleh produsen vaksin Tiongkok pada saat itu, 40 juta dosis vaksin Sinovac juga diprioritaskan untuk PT Biofarma pada Maret 2021.

Diplomasi kedua negara semakin diperkuat oleh pernyataan Wang Yi, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, yang mengatakan bahwa Tiongkok telah berjanji untuk membantu Indonesia menjadi pusat produksi vaksin di Asia Tenggara. Tiongkok adalah pemasok utama vaksinasi ke Indonesia. Bahkan 9 dari 11 tahap vaksinasi yang masuk ke Indonesia berasal dari negeri tirai bambu. Pada tanggal 6 Desember 2020, Indonesia mulai menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac, yang menandai dimulainya pengiriman vaksin pertama. Sejak saat itu, sebanyak 3.982.400 vaksin Sinovac dan Sinopharm serta 65.500.000 bahan baku vaksin Sinovac telah dikirim ke Indonesia dari Tiongkok ([Wibowo, 2020](#)). Salah satu bentuk kolaborasi bilateral selama pandemi Covid-19 adalah hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Kedua negara melakukan diplomasi ini dalam upaya memajukan kepentingan nasional masing-masing dan memajukan kesehatan global. Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok dinilai lebih efektif dikarenakan aktor kesehatan yang semakin berkurang akibat respon awal yang kurang sigap dari WHO terhadap pandemi Covid-19. Pada masa pandemi, hubungan multilateral yang terjadi di suatu Kawasan terbilang tidak efektif dikarenakan pengambilan keputusan akan menjadi lebih lama sementara penanganan dibutuhkan secepatnya. Dari sini negara dapat menyimpulkan bahwa hubungan bilateral yang didasari oleh pandemi dapat menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun panjang ([Hadyan, 2021](#)).

Indonesia sebelumnya merupakan anggota kelompok *Advanced Market Commitment*, yang menyiratkan bahwa Indonesia menerima kuota vaksin dari WHO sebesar 20% dari total populasi, tetapi kuota ini tidak mencukupi untuk program vaksinasi yang dipercepat. Untuk memenuhi kekurangan, Indonesia pun melakukan kerja sama dengan Tiongkok. Perlu diingat bahwa jauh sebelum terjadinya pandemi, Indonesia dan Tiongkok telah memiliki hubungan yang baik selama 70 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Indonesia bisa dengan lebih mudah untuk melakukan koneksi dengan Tiongkok dalam penerapan diplomasi vaksin. Tiongkok sendiri memprioritaskan Indonesia sebagai penerima vaksin utama di kawasan Asia Tenggara ([Hanura dkk., 2022](#)). Berkat hal ini, Indonesia menduduki peringkat keempat vaksinasi terbanyak di dunia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Tiongkok berada pada urutan pertama, kemudian India pada posisi kedua dan Amerika Serikat pada posisi ketiga, sementara Brazil berada satu peringkat dibawah Indonesia. Dengan dibangunnya fasilitas produksi vaksin di Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin Covid-19 di kawasan Asia Tenggara, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal vaksin Covid-19 ini berdampak pada semakin kuatnya hubungan dagang kedua negara. Pembangunan pusat produksi vaksin tentunya menguntungkan perekonomian Indonesia serta meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan fasilitas produksi vaksin Covid-19 ini juga sebagai wadah bagi kedua negara untuk bertukar teknologi dan ilmu pengetahuan.

Indonesia mengajak Tiongkok bekerja sama dalam vaksin dikarenakan negara-negara maju produsen vaksin seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih mengutamakan pemenuhan kuota nasional masing-masing terlebih dahulu sehingga Indonesia harus mencari negara lain yang bisa memenuhi permintaan vaksin domestiknya. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Tiongkok juga menjadikan kerja sama ini lebih efektif dan efisien, pendistribusian vaksin dari Tiongkok menuju Indonesia bisa lebih cepat sehingga tujuan vaksinasi harian bisa tercapai ([Wicaksono dkk., 2022](#)). Jika dibandingkan dengan negara produsen vaksin lainnya seperti Amerika Serikat tentunya akan memakan waktu yang lebih lama dalam pendistribusian vaksin ke Indonesia. Selain itu, vaksin Sinovac buatan Tiongkok memiliki waktu produksi yang lebih cepat dibandingkan dengan vaksin sejenis.

Vaksin Sinovac lebih mudah dan aman untuk dibawa ke Indonesia karena vaksin ini harus disimpan pada suhu antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Karena vaksin dapat disimpan di dalam lemari pendingin yang biasanya dapat mencapai suhu serendah -4 derajat celcius, maka pendistribusiannya pun menjadi lebih sederhana ([Pearson, 2021](#)). Penyimpanan vaksin Sinovac jauh lebih mudah karena vaksin ini didasarkan pada virus yang tidak aktif dibandingkan dengan vaksin lain seperti vaksin Moderna berbasis mRNA dengan suhu penyimpanan -20°C dan vaksin Pfizer membutuhkan suhu penyimpanan -70°C dan -80°C ([Pearson, 2021](#)). Dengan beragam kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini diharapkan kedepannya Indonesia dengan Tiongkok dapat melakukan kerja sama dalam bidang lainnya.

Situasi dan kondisi internal Tiongkok selama pandemi terkenal dengan kebijakan yang sangat ketat untuk warganya. Tiongkok berani menerapkan *lockdown* panjang bahkan saat kasus Covid-19 tidak sedang meningkat di negaranya. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan umum yang diterapkan negara-negara di dunia yakni *lockdown* hanya diterapkan ketika kasus sedang meninggi. Kemudian Tiongkok menggunakan teknologi mutakhir dengan melacak ponsel genggam rakyatnya untuk melakukan proses *tracking* kasus ([BBC, 2020](#)). Tiongkok sebagai negara komunis menerapkan kebijakan terkait pandemi dengan lebih mudah sebab rakyat memiliki kecenderungan untuk patuh kepada negara dengan beranggapan bahwa negara melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Lebih lanjut, penanganan Covid-19 di Tiongkok terus diperbarui oleh ilmuwan dan praktisi ahli yang mereka miliki.

Percepatan vaksinasi juga mempercepat terkendalinya situasi pandemi sejalan dengan memfokuskan penanganan terhadap daerah dengan kasus harian tertinggi. Tiongkok juga menerapkan wajib isolasi lebih dari 14 hari kepada siapa saja yang memasuki wilayahnya. Selain itu, Tiongkok memiliki program Tunas Musim Semi (*Spring Root Program*) untuk membantu lebih dari 1,7 juta diasporanya agar menerima vaksin. Tiongkok juga mengedepankan kerja sama internasional untuk membantu penanganan pandemi secara global ([Yulianingsih, 2021](#)). Akses terhadap informasi seputar Covid-19 merupakan alasan penting keberhasilan dalam mengendalikan kasus.

Indonesia sendiri memiliki kebijakan yang terpusat dalam penanganan Covid-19. Misalnya pemberlakuan karantina, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diarahkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan pada level daerah oleh pemerintah daerah. Keseragaman kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam penanganan Covid-19 sedikit banyak mengadopsi kebijakan terpusat yang dilakukan oleh Tiongkok. Penanganan cepat selama pandemi akan lebih efektif jika berada di bawah otoritas pusat sebab jika terlalu mengandalkan proses demokrasi akan memakan waktu yang lebih lama untuk menyamakan pemahaman dan proses penyusunan perencanaan padahal situasi yang terjadi sedang genting. *Tracking* kasus yang dilakukan Indonesia melalui aplikasi peduli lindungi merupakan salah satu contoh penerapan serupa yang mirip dengan apa yang dilakukan Tiongkok. Aplikasi tersebut mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pusat vaksinasi terdekat, pencegahan dan penanganan awal Covid-19 sembari pemerintah dapat mengawasi dinamika kenaikan serta penurunan kasus.

### Tantangan

Tantangan yang ditemukan dari kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok selama pandemi adalah sebagai berikut:

#### A. Persebaran Vaksin yang Belum Merata

Indonesia belum mampu mengoptimalkan bantuan dari Tiongkok dikarenakan beberapa faktor internal yang dimiliki oleh negara. Tercatat hingga awal pertengahan tahun 2021, persebaran vaksin yang ada di Indonesia belum merata walaupun Tiongkok telah memprioritaskan Indonesia dalam diplomasi vaksinnya ([Wibowo, 2020](#)). Hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Indonesia untuk dapat menyebarkan vaksin yang diberikan oleh Tiongkok secara merata kepada seluruh daerah di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, sulitnya akses ke beberapa daerah merupakan tantangan yang harus segera disiasati oleh pemerintah.

#### B. Kebijakan Tentang Covid-19 yang Selalu Berubah-ubah

Kebijakan tentang Covid-19 yang selalu berubah-ubah berdampak pada sulitnya tercapai keefektifan dari vaksin yang diberikan oleh Tiongkok. Misalnya seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan jam operasional fasilitas publik yang tak menentu. Hal tersebut menjadi alasan berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada sehingga Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Selain itu, kebijakan Indonesia yang terus melakukan percepatan program diplomasi membuat efikasi dari vaksin itu sendiri menjadi berkurang. Perubahan kebijakan yang sering terjadi disebabkan oleh sistem politik Indonesia sebagai negara *weak democracy* sehingga sulit untuk menseragamkan

kebijakan ditengah-tengah interupsi dari berbagai pihak, banyaknya pertimbangan dalam menyatukan pemikiran yang dilakukan ketika membuat kebijakan juga mempengaruhi hal ini.

### C. Efektivitas Vaksin Tiongkok Dipertanyakan

Efikasi minimum yang disyaratkan oleh WHO untuk vaksinasi yang akan didistribusikan adalah 50%. Efektivitas vaksin Sinovac bervariasi di setiap negara. Penilaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap efektivitas vaksin Sinovac di Indonesia adalah 65,3%. Namun, statistik ini sangat rendah jika dibandingkan dengan vaksinasi lainnya, seperti kemanjuran 95% dari Pfizer, kemanjuran 94% dari Moderna, dan kemanjuran 70% dari Astrazeneca. Karena kurangnya data yang tersedia untuk umum, banyak orang juga mempertanyakan kemanjuran vaksin Sinovac ([Pearson, 2021](#)). Sebaliknya, produsen vaksin lain seperti Moderna, Pfizer, dan Astrazeneca secara terbuka mengungkapkan temuan uji klinis. Vaksin Sinovac memang memenuhi kriteria kemanjuran, tetapi jika vaksin yang disediakan memiliki kemanjuran yang besar, dampaknya pasti akan berkurang. Munculnya varian baru virus Corona di India, yaitu varian Delta dan Kappa, membuat pemerintah mempercepat vaksinasi.

Hingga Juni 2021, masih belum ada hasil yang konklusif mengenai kemanjuran vaksin Sinovac terhadap virus mutan Delta. Dikarenakan mengandung virus yang telah dibuat tidak aktif dan tidak dapat bereproduksi di dalam tubuh manusia, vaksin Sinovac juga mendapat kecaman. Sementara Pfizer dan Astrazeneca telah mengklaim bahwa kedua vaksin mereka dapat digunakan untuk memerangi virus varian Delta dan Kappa. Tiongkok sendiri belum menghasilkan data yang konklusif mengenai efisiensi vaksin Sinovac untuk virus varian Delta dan Kappa. Hal ini patut menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dikarenakan sebagian besar rakyatnya telah menggunakan vaksin Sinovac yang belum teruji keefektifannya. Hingga saat ini, hanya empat vaksin yang telah disetujui untuk digunakan oleh *European Medicines Agency* (EMA), lembaga Uni Eropa yang bertanggung jawab atas evaluasi dan pengawasan obat-obatan: Comirnaty (BioNTech, Pfizer), Vaksin COVID-19 Moderna, Vaxzevria (Vaksin COVID-19 AstraZeneca), dan Vaksin COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson). Rendahnya efisiensi vaksin Sinovac sebagian besar menjadi penyebab penolakannya.

Hanya 51% orang yang menerima vaksin Sinovac akan mengalami penyakit ringan atau sedang. Covaxin dan Sinopharm memiliki tingkat kemanjuran yang sama yaitu sekitar 78%, hasil tersebut menurut negara-negara yang telah menggunakannya dalam uji klinis ([Pearson, 2021](#)). Di sisi lain, vaksin Pfizer-BioNTech memiliki tingkat efektivitas 95% ([Pearson, 2021](#)). Data tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia membatasi pilihan vaksin bagi penduduknya dengan hanya mengandalkan dan mengutamakan vaksin Sinovac yang dikembangkan di Tiongkok.

D. Pembatasan Warga Indonesia ke Luar Negeri

Lebih jauh lagi, Indonesia bergegas memilih untuk menggunakan vaksinasi buatan Tiongkok sehingga masyarakat Indonesia berisiko tidak dapat melakukan perjalanan ke beberapa tempat karena jumlah vaksinasi Sinovac yang sangat banyak. Data mengenai efektivitas vaksin Sinovac yang tidak tersedia membuat beberapa negara ragu untuk menerima wisatawan dengan sertifikat vaksin asal Tiongkok tersebut. Jika ditelaah melalui kacamata politik, hal ini merupakan tekanan tidak langsung yang dilakukan oleh negara-negara produsen vaksin yang bersaing dengan Tiongkok. Tujuan ekonomi untuk mencapai profit sebesar-besarnya dengan merusak target konsumen kompetitor merupakan hal yang lumrah ditemui. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan Indonesia dalam keberlangsungan kerjasama.

E. Ketergantungan dan Implikasinya terhadap kasus sengketa Laut China Selatan

Ketergantungan harus diwaspadai oleh Indonesia karena hal ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia di dunia internasional dan mempengaruhi keputusan Indonesia untuk memprioritaskan kepentingan regional Tiongkok, seperti dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan. Karena pasokan Tiongkok yang melimpah, kedua negara memiliki surat utang diplomatik yang sangat berharga yang dikenal sebagai IOU (*I owe you*). Tiongkok dirugikan secara diplomatik dan hukum dalam sengketa Laut Cina Selatan. Wilayah ini telah berkembang menjadi medan pertempuran bagi negara-negara besar. Tiongkok akan membutuhkan bantuan dari negara-negara ASEAN dalam persiapan untuk diskusi Kode Etik (*Code of Conduct/CoC*) di Laut Cina Selatan ([Zaini, 2021](#)). Pemerintah Indonesia menyampaikan dua nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB (pada tanggal 26 Mei dan 12 Juni) pada tahun 2020, ketika Indonesia sedang menegosiasikan kerja sama vaksin dengan Tiongkok, untuk menolak hak Tiongkok atas Laut Cina Selatan.

Terkait masalah maritim ini, peraturan UNCLOS 1982 tidak dapat dilanggar dan diperlukan agar Laut Cina Selatan menjadi damai dan stabil. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang sedang berkunjung pada tanggal 13 Januari 2021, di hari yang sama ketika Presiden Jokowi melakukan vaksinasi Sinovac pertamanya. Retno, Menteri Luar Negeri Indonesia, mendorong Tiongkok untuk menjunjung tinggi UNCLOS 1982 dan menjaga perdamaian Laut Cina Selatan dalam konferensi tersebut atas nama ASEAN dan menyoroti dedikasi Indonesia terhadap stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran. Namun, kerja sama Tiongkok dengan Indonesia dalam masalah vaksinasi dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar dan pada akhirnya menyebabkan Indonesia mengalah dalam pendiriannya terhadap masalah Laut Cina Selatan.

Indonesia dan Tiongkok sendiri sebenarnya kerap bersitegang dalam hal eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Laut. Pada akhir tahun 2019 hingga awal 2020 berulang kali ditemukan laporan terkait nelayan Tiongkok yang memancing di

wilayah Laut Natuna milik Indonesia. Kedua negara sempat ingin melakukan gencatan senjata dikarenakan hal tersebut. Milisi nelayan dan penjaga pantai Tiongkok tetap bersikeras melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna, sebuah wilayah di Samudera Pasifik antara Kalimantan dan Sumatra yang dianggap Tiongkok sebagai daerah penangkapan ikan tradisionalnya. Namun, Tiongkok akhirnya mengambil keputusan untuk mundur, meskipun masih ada serangan-serangan sporadis.

### **Keterkaitan Kasus Dengan Teori Politik Global**

Indonesia maupun Tiongkok membawa kepentingan negara masing-masing sebagai misi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Tiongkok dapat dengan baik menyelaraskan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Dalam hal memperbaiki citra negara yang rusak dikarenakan salah satu kotanya yakni Wuhan diduga menjadi tempat beraslanya virus Covid-19. Tiongkok kemudian menjalin hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara berkembang yang ada disekitarnya misalnya negara-negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini dipilih dikarenakan negara-negara tersebut merupakan negara berkembang yang sedang membutuhkan perhatian dari negara maju untuk bangkit dari keterpurukan yang terjadi karena pandemi Covid-19. Selain itu, negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang menjadi lawan Tiongkok dalam kasus sengketa Laut China Selatan. Tiongkok pun menyerang titik lemah tersebut dengan harapan negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki perasaan untuk membayar hutang budi terhadap Tiongkok melalui kasus sengketa Laut China Selatan.

Tiongkok memprioritaskan kawasan tersebut dalam pendistribusian vaksin serta sebagai pusat produksi vaksin global karena Tiongkok merasa bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk menyukseskan misinya tersebut ([Agape, 2021](#)). Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk yang dapat dimanfaatkan sebagai uji keefektifitasan vaksin yang dimiliki oleh Tiongkok serta memiliki posisi yang strategis dalam kasus sengketa Laut China Selatan. Indonesia sendiri sebenarnya adalah pihak yang melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Tiongkok. Hal ini didasari oleh kebutuhan mendesak negara yang harus segera menurunkan kasus hariannya dengan program vaksinasi agar bisa membangun kembali perekonomian yang merosot.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama yang terjadi antar kedua negara berjalan dengan sangat baik. Indonesia menjadi negara yang paling banyak melakukan program vaksinasi di dunia. Capaian tersebut di sponsori oleh Tiongkok sehingga citra Tiongkok di ranah internasional dapat dikatakan menjadi sedikit lebih baik. Di sisi lain, setelah kepentingan nasional dalam memenuhi kebutuhan domestik vaksin telah terpenuhi maka Indonesia pun semakin memperluas peluang kerja sama yang terjalin dengan Tiongkok pada aspek lainnya. Tiongkok bisa saja menjadikan hal tersebut sebagai upaya agar Indonesia semakin bergantung kepadanya, dengan harapan Indonesia bisa melunak dan memihak Tiongkok di kasus internasional. Jikalau Indonesia tidak bergeming pada kasus dalam forum

internasional, Tiongkok tetap dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menguatkan perekonomian serta pengaruh mereka terhadap Indonesia. Selanjutnya, kepentingan nasional Tiongkok diuji ketika vaksin Sinovac dinyatakan tidak efektif oleh EMA (*European Medicine Agency*).

Hal ini didasarkan dari tidak adanya transparansi data yang jelas terkait keefektifan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Terlihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Bisa saja EMA mengeluarkan pernyataan tersebut dikarenakan negara-negara produsen vaksin seperti Amerika, Inggris, dan sebagainya masih memprioritaskan kebutuhan domestik masing-masing sebelum berbagi pasokan vaksin dengan negara lainnya terutama negara berkembang. Sehingga tidak hadirnya produsen pemegang pasar dapat diatasi dengan adanya isu ketidakefektifan produk yang dimiliki oleh kompetitornya. Negara yang sudah dalam posisi terdesak tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai efektivitas, mereka memerlukan sesuatu yang dapat dijangkau sebagai pertolongan pertama bagi warganya. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk setidaknya menggenggam satu kawasan terdekat yaitu Asia Tenggara yang dihuni oleh negara-negara berkembang yang sangat berpotensi di berbagai bidang.

Celah tersebut kemudian coba ditutupi kembali oleh negara-negara produsen vaksin selain Tiongkok melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh EMA. Sehingga Tiongkok memang memenangkan pertarungan yang singkat namun keadaan mereka dapat dibalikkan di pertarungan selanjutnya. Pernyataan dari EMA tersebut kemudian menjadi pertimbangan negara-negara berkembang untuk menerima pasokan vaksin dari Tiongkok yang mana hal ini dapat mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang terhadap Tiongkok walaupun sebenarnya ketergantungan mereka hanya berpindah tangan ke pihak lainnya ([McDonagh, 2021](#)). Negara berkembang pada akhirnya tetap menjadi pihak pertarungan negara yang memiliki pengaruh kuat secara global. Pentingnya kecerdikan dari negara berkembang untuk memanfaatkan celah yang ada dalam mencapai kepentingan nasionalnya menjadi poin yang sangat diperlukan. Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok ternyata dapat mempengaruhi perpolitikan secara global. Kepentingan dan kekuasaan yang menjadi kunci dari teori Politik Global dapat terlihat dengan jelas dalam diplomasi vaksin dan kasus kerja sama Indonesia dengan Tiongkok.

Dalam pasar jual beli vaksin global, Indonesia berperan sebagai negara konsumen. Negara produsen vaksin misalnya seperti Tiongkok dan Amerika Serikat tentunya saling berebut konsumen dalam pasar. Pada studi kasus ini terlihat bahwa Tiongkok berhasil mendapatkan Indonesia sebagai konsumen vaksinnya. Dalam kerja sama ini sederhananya terjadi posisi yang seimbang antara dua negara yakni kebutuhan vaksin Indonesia dapat dipenuhi oleh Tiongkok. Lebih lanjut, negara merupakan aktor yang penting dalam penanganan pandemi sebab kejadian yang berlangsung di luar prediksi tentunya membutuhkan negara sebagai media untuk mencari solusi dengan salah satu caranya yakni melakukan diplomasi dengan menggunakan vaksin sebagai alatnya.



## KESIMPULAN

Diplomasi vaksin merupakan hubungan antar negara yang terjalin didasari oleh kepentingan negara tersebut di bidang vaksin. Diplomasi vaksin dapat dijadikan jembatan oleh negara-negara dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing di ranah nasional maupun internasional. Studi kasus kerja sama Indonesia-Tiongkok merupakan salah satu contoh penerapan diplomasi vaksin. Kedua negara sepakat untuk melakukan kerja sama dikarenakan keduanya yakin dapat saling memenuhi kepentingan masing-masing. Indonesia dapat memenuhi kepentingannya dalam mengurangi keterpurukkan yang diakibatkan pandemi. Melalui program vaksinasi yang diharapkan dapat menurunkan kasus harian dan kemudian Indonesia dapat membangkitkan kembali perekonomiannya.

Selain itu, diplomasi vaksin yang berhasil dilakukan dapat menjadi alasan Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan Tiongkok di bidang lainnya. Di samping itu, Tiongkok yang tengah memiliki citra buruk akibat virus corona serta ingin lebih memperluas pengaruhnya melihat ajakan kerja sama dari Indonesia sebagai kesempatan emas. Citra Tiongkok dapat diperbaiki dengan menunjukkan kepedulian mereka terhadap negara-negara berkembang di sekitarnya yaitu kawasan Asia Tenggara. Citra Tiongkok kemudian semakin diperbaiki ketika Indonesia menjadi negara dengan dosis vaksinasi tertinggi di dunia disusul oleh Filipina, Kamboja dan Singapura. Hal tersebut membuktikan bahwa Tiongkok sangat memprioritaskan kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya, Tiongkok dapat memanfaatkan hal ini dengan memberikan efek ketergantungan terhadap negara-negara berkembang yang ada di kawasan Asia Tenggara yang kemudian berpengaruh terhadap posisi mereka di skala internasional. Kasus sengketa Laut China Selatan misalnya, Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kasus ini telah berhasil dipengaruhi oleh Tiongkok lewat diplomasi vaksin yang terjadi. Di sini pentingnya kesadaran pemerintah untuk bersikap netral terhadap segala permasalahan yang ada. Baik Tiongkok maupun Indonesia seharusnya bisa saling menutup celah yang ditemukan dalam sebuah kerja sama yang terjalin. Celah yang dimiliki oleh Tiongkok terdapat pada tidak jelasnya keefektifan vaksin produksi mereka yang mana kemudian dapat memicu hilangnya negara yang ingin menggunakan vaksinnya. Ditambah lagi adanya varian virus baru yaitu Delta dan Kappa dan vaksin Sinovac belum dapat mengatasi kedua varian tersebut. Hal ini kemudian dapat berdampak kepada hilangnya semua usaha yang dibangun oleh Tiongkok untuk memperbaiki citranya dalam lingkup internasional serta misi kepentingan nasional negara.

Tiongkok seharusnya dapat membuka transparansi keefektifan vaksin mereka sebelum kehilangan konsumennya. Dalam kerja sama ini, Indonesia sendiri berpotensi untuk memperpanjang ketergantungan yang dimiliki terhadap Tiongkok dalam berbagai bidang serta memicu Indonesia untuk mengutamakan agenda yang direncanakan oleh Tiongkok sebagai salah satu cara membalas bantuan yang diterima. Pemerintah Indonesia berperan besar untuk menanggulangi hal tersebut atau setidaknya tidak memperparah ketergantungan yang dimiliki oleh Indonesia ataupun bisa mengambil keuntungan dari

celah-celah yang ada dalam kerja sama ini. Dapat terlihat bahwa kerja sama yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok sedikit mempengaruhi politik secara global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agape, G. C. (2021). Jalur Sutra Kesehatan: Upaya China Mencapai Kepentingan Geopolitik Melalui Diplomasi Vaksin. *Transformasi Global*, 8(2), 130-142. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.02.2>
- Anggraito, H. W. (2022). *Upaya Diplomasi Vaksin Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- BBC. (2020, April 2). *Virus Corona; Bagaimana China Mengatasi Wabah Covid-19 Melalui Teknologi Tersembunyi, Dengan Penduduk Dilacak Lewat Telepon Genggam*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52141201>
- Bestari, N.P. (2022, February 18). *Sinovac Bicara Cuan Triliunan Rupiah dari Vaksin Covid-19*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220201053044-37-311963/sinovac-bicara-cuan-triliunan-rupiah-dari-vaksin-covid-19>
- Hadyan, R. (2021, September 17). *Diplomasi Vaksin Bukan Sekedar Mengamankan Stok Saja*. Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210917/15/1443771/diplomasi-vaksin-bukan-sekedar-mengamankan-stok-saja>
- Hanura, M., Susiatiningsih, H., Utomo, T., Rusyadi, R., & Putri, S. U. (2022, February). *Managing Common Security: Indonesia-China Cooperation in Handling Covid-19 Pandemic*. In *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021*, September 15, 2021, Semarang, Indonesia.
- Hermawan, B. (2020, June 6). *Indonesia Dapat Bantuan Penanganan Covid-19 dari China*. Republika.co.id. <https://www.republika.co.id/berita/qbgtic354/indonesia-dapat-bantuan-penanganan-covid19-dari-china>
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- Hidayat, A.A.N. (2020, March 27). *40 Ton Bantuan Alat Kesehatan dari China Tiba di RI*. Tempo.co. <https://bisnis.tempo.co/read/1324554/40-ton-bantuan-alat-kesehatan-dari-investor-cina-tiba-di-ri>
- Hidayat, A., Anam, S., & Munir, A. M. (2022). *Diplomasi Vaksin: Strategi Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Kesehatan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19*. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 17-34. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.44>
- Jayani, D. H. (2021, October 29). *Investasi Tiongkok ke Indonesia Capai US\$ 2,3 Miliar hingga September 2002*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/29/investasi-tiongkok-ke-indonesia-capai-us-23-miliar-hingga-september-2021>
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Julita, L. S. (2020, November 24). *RI Kena Banjir Bandang Impor Alkes China, Ini Buktinya!*. CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201124150425-4-204258/ri-kena-banjir-bandang-impor-alkes-china-nih-buktinya>

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021, June 20). *Sebanyak 10 Juta Dosis Vaksin Kembali Tiba di Indonesia*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35149/sebanyak-10-juta-dosis-vaksin-covid-19-kembali-tiba-di-tanah-air/0/berita>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, March 26). *Kerja Sama Regional*. <https://kemlu.go.id/portal/id/page/20/kerja-sama-regional>
- Lee, S.T. (2021). Vaccine diplomacy: nation branding and China's COVID-19 soft power play. *Place Branding and Public Diplomacy*, 1-15.
- McDonagh, N. (2021). System Rivalry during Pandemic Times: A Political Economy View of Great Power Vaccine Diplomacy. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3873029>
- McDonald, J. W. (2002). The need for multi-track diplomacy. *Second track/citizens' diplomacy*, 49-60.
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. doi:10.1177/0002716207311699
- Pannier, A. (2020). Bilateral relations. *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*, 19-33.
- Pearson, C. (2021, December 15). *China Promotes Vaccines Around The World, but Critics Point to Lower Efficacy*. VoAnews.com. <https://www.voanews.com/a/china-promotes-vaccines-around-the-world-but-critics-point-to-lower-efficacy-/6355437.html>
- Rezkisari, I. (2021, August 25). *Diplomasi Vaksin Indonesia Dipuji*. Republika.co.id. <https://republika.co.id/berita/qye5ne328/diplomasi-vaksin-indonesia-dipuji>
- Sorongan, T. P. (2021, July 15). *Menlu Retno Buka-bukaan Soal Diplomasi Vaksin di Era Pandemi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20210715141003-41-261167/menlu-retno-buka-bukaan-soal-diplomasi-vaksin-di-era-pandemi>
- Su, Z., McDonnell, D., Li, X., Bennett, B., Šegalo, S., Abbas, J., Cheshmehzangi, A., Xiang, Y.-T. (2021). COVID-19 Vaccine Donations—Vaccine Empathy or Vaccine Diplomacy? A Narrative Literature Review. *Vaccines* 9(9), 1024. <https://doi.org/10.3390/vaccines9091024>
- The Conversation. (2021, September 10). *Diplomasi vaksin Indonesia Perlu Lebih Strategis Bukan Semata Soal Stok Vaksin*. TheConversation.com. <https://theconversation.com/diplomasi-vaksin-indonesia-perlu-lebih-strategis-bukan-semata-soal-stok-vaksin-167056>
- Wibowo, E. A. (2020, July 26). *2 Alasan Distribusi Vaksin Covid-19 Belum Merata*. Nasionaltempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1487322/2-alasan-distribusi-vaksin-covid-19-belum-merata>
- Wicaksono, R. M. T. A. D., Hirawan, F. B., & Ragamustari, S. K. (2022). An Analysis of Indonesia's Free and Active COVID-19 Vaccine Diplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 32-45. <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.13087>
- World Health Organization. (2020, March 11). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/director->

[general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020](https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020)

- Yang, H., Bin, P., & He, A. J. (2020). Opinions from the epicenter: an online survey of university students in Wuhan amidst the COVID-19 outbreak1. *Journal of Chinese Governance*, 5(2), 234-248.
- Yulianingsih, T. (2021, July 15). *Ini 4 Upaya China Lawan Covid-19 Hingga Masuk ke Fase Normal*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/4607827/ini-4-upaya-china-lawan-covid-19-hingga-masuk-ke-fase-normal>
- Yuniarto, T. (2022, March 15). *Politik Luar Negeri Indonesia: Profil, Sejarah, dan Aktualitas*. Kompas.com. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/03/15/politik-luar-negeri-indonesia-profil-sejarah-dan-aktualitas>
- Zaini, K. (2021). *China's Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A Mixed Record*. © ISEAS Yusof Ishak Institute. <http://hdl.handle.net/11540/13807>.

## TENTANG PENULIS

Jihan Nadya Yahya merupakan Mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama.

Helga Yohana Simatupang merupakan Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama. Fokus riset Helga meliputi: hubungan internasional, kebijakan luar negeri, diplomasi, dan studi kemanusiaan.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:

Yahya, J.N., & Simatupang, H.Y. (2023). *Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi Covid-19*. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(2), 106-125. DOI: 10.31957/pjdir.v3i2.2855